

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN PENULARAN HIV PASCA PAJANAN

Rathia Ayuningtyas

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat terwujud apabila seorang dokter dapat memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional (SPO), dan etika profesi, serta dapat memenuhi kebutuhan kesehatan pasien, seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan (da sein). Ancaman terhadap dokter terjadi di beberapa layanan dikarenakan belum banyaknya masyarakat yang mengetahui prosedur pemberian obat pencegahan penularan HIV, sedangkan SPO yang dapat melindungi dokter baru ada di 16 dari 33 layanan perawatan dukungan pengobatan (PDP) HIV di wilayah Jakarta Selatan, itupun hanya untuk kasus kecelakaan kerja, belum sesuai dengan permenkes no.22 tahun 2023 (da sollen).

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perwujudan perlindungan hukum bagi dokter dalam upaya pencegahan penyakit dan apakah ada standar prosedur operasional yang sesuai dengan peraturan Menteri kesehatan no.23 tahun 2023 terkait penanggulangan HIV sebagai suatu norma hukum yang berlaku saat ini (*ius contitutum*) melalui kajian, telaah dan analisis metode penelitian sehingga dapat diketahui pemberlakuan norma hukum tersebut dalam perspektif hukum yang dicita-citakan oleh Konstitusi Negara, yaitu hukum yang memiliki keadilan, kepastian dan mensejahterakan (*ius constituendum*).

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan *metode yuridis normatif* dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan wawancara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SPO terstandarisasi kemenkes diseluruh layanan PDP merupakan salah satu komponen yang dapat memberikan perlindungan bagi dokter dalam memberikan layanan kesehatan pencegahan penularan HIV.

Kata kunci: Perlindungan hukum dokter, standar profesi, standar prosedur operasional

LEGAL PROTECTION FOR PHYSICIANS IN ADMINISTERING HIV POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS

Rathia Ayuningtyas

ABSTRACT

Legal protection for a doctor in providing health services can be realized if a doctor can fulfil professional standards, professional service standards, standard operational procedures (SOP), and professional ethics, and also can fulfil the health needs of patients, as stated in Law number 17 2023 on health (da sein). Threats to doctors occur in several services because not many people know the procedures for administering drugs to prevent HIV transmission, while SOPs that can protect doctors only exist in 16 of the 33 HIV care, support and treatment (CST) in the South Jakarta area, and that's only for work accident cases, not yet in accordance with health regulation no. 22 of 2023 (da sollen).

The aim of writing this thesis is to explain how legal protection for doctors is implemented in efforts to prevent disease and whether there are standard operational procedures that are in accordance with the Minister of Health's regulation no. 23 of 2023 regarding HIV control as a legal norm currently in force (*ius contitutum*) through study, review and analysis of research methods so that the application of these legal norms can be seen from the legal perspective envisioned by the State Constitution, namely law that has justice, certainty and prosperity (*ius constituendum*).

The research method used in this writing is the normative juridical method using the statute approach and interviews.

This research shows that the existence of standardized SPOs from the Ministry of Health in all PDP services is one component that can provide protection for doctors in providing health services to prevent HIV transmission.

Keywords: Doctor's legal protection, professional standards, standard operating procedures